

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa referensi dari peneliti terdahulu yang juga melakukan penelitian berkaitan dengan penerapan standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada usaha kecil dan menengah (UKM) yaitu sebagai berikut:

Menurut Lidya Andriani (2014) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis SAK ETAP pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Sebuah Studi interpretatif pada peggy salon”. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang dititikberatkan pada deskripsi serta interpretasi perilaku manusia dalam penerapan pencatatan keuangan berbasis SAK ETAP. Penelitian dilakukan dalam empat tahapan, yakni : 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, serta 4) analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) sistem pencatatan keuangan yang dilakukan secara manual dan masih sangat sederhana, alasan membuat pencatatan keuangan adalah untuk mempermudah pemilik dalam memberikan bonus kepada karyawan, 2) Faktor yang menyebabkan gagalnya SAK ETAP pada peggy salon karena adanya faktor internal berupa kurangnya pemahaman, kedisiplinan dan sumber daya manusia, sedangkan faktor eksternalnya karena kurangnya pengawasan dari stakeholder yang berkepentingan dengan laporan keuangan.

Menurut Edi siswono (2013) dalam skripsinya berjudul, “Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan pada Usaha Kecil Menengah Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Studi Kasus UKM Brebes Fried Chicken). Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk membantu pelaku bisnis usaha kecil dan menengah khususnya UKM Brebes Fried Chicken dalam memahami peran dan penerapan akuntansi dalam penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP pada aktivitas

bisnisnya. Penelitian ini juga dapat bertujuan untuk ikut mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya tentang usaha kecil dan menengah khususnya sebagai wujud nyata keterkaitan dunia perguruan tinggi dalam aspek pengabdian terhadap masyarakat khususnya usaha kecil dan menengah dalam dunia praktis. Tujuan dari penelitian yaitu menyusun laporan keuangan di UKM Brebes Fried Chicken Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Hasil penelitian tersebut Brebes Fried Chicken sebelumnya tidak pernah menyusun dan membuat laporan keuangan usaha yang dijalannya tersebut. Dalam pembuatan laporan keuangan kendala-kendalanya antara lain kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan serta kurangnya waktu yang difokuskan untuk membuat laporan keuangan karena waktu yang ada lebih dimaksimalkan pada kegiatan operasi usaha. Pada UKM Brebes Fried Chicken persediaan per hari merupakan hal yang paling berpengaruh terhadap laba, karena persediaan hari ini dihabiskan untuk hari ini. Pada umumnya harga bahan baku sering naik turun, terutama ayam potong yang berpengaruh cukup signifikan terhadap laba bersih yang dihasilkan. UKM Brebes Fried Chicken melakukan persediaan jika bahan baku langka dipasaran, contohnya seperti caos. Penerapan laporan keuangan seperti laporan laba atau rugi, laporan perubahan modal, laporan aliran kas, dan neraca maka dapat berguna bagi UKM Brebes Fried Chicken untuk mengetahui keadaan keuangan usahanya, membuat analisa sebelum mengambil keputusan dan berguna di kemudian hari untuk memperoleh dana pinjaman modal dari bank untuk meningkatkan usahanya.

Menurut Arri Alfitri (2014) dalam skripsinya berjudul “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perajin Mebel Desa Gondangsari Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana pemahaman Perajin mebel di UMKM Desa Gondangsari tentang SAK ETAP (2) Bagaimana pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan perajin mebel Desa Gondangsari, dan mengetahui apakah pencatatan dan penyusunan laporan

keuangan sudah mengacu pada SAK-ETAP (3) Kendala-kendala yang dihadapi perajin mebel dalam melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada SAK-ETAP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pemahaman perajin mebel tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK-ETAP) masih rendah. (2) Pencatatan keuangan yang dilakukan perajin mebel hanya sebatas laporan bisnis yang dibuat sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masing-masing perajin mebel. (2b) Perajin mebel tidak menerapkan SAK-ETAP dalam ETAP, (3) Kendala-kendala perajin mebel dalam menerapkan SAK-ETAP, sebagai berikut : kurangnya pengetahuan perajin mebel tentang SAK-ETAP, belum adanya tenaga akuntansi yang profesional pada perajin mebel, perajin mebel kurang memahami pentingnya pencatatan dan penyusunan laporan keuangan, dan kurang efektifnya sosialisasi dari pihak yang berkompeten tentang SAK-ETAP.

Menurut Yusriwati (2016) dalam skripsinya berjudul “Analysis of Factors Affecting Implementation of Entity Financial Accounting Standards without Public Accountability (SAK ETAP) in Middle Small Micro Businesses (UMKM) District in Indragiri District Region”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana pemahaman UMKM di kecamatan wilayah kabupaten Indragiri Hilir Riau, tentang SAK ETAP (2) Bagaimana pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan UKM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, dan mengetahui apakah pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sudah mengacu pada SAK-ETAP (3) Kendala-kendala yang dihadapi UMKM dalam melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada SAK-ETAP.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan primer data dengan penyebaran kuesioner dan data sekunder, dimana kuesioner diukur menggunakan skala nominal dan skala Likers. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang dibutuhkan untuk mendukung hasil penelitian yang bersumber dari jurnal. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pemahaman UMKM indragiri tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK-ETAP) masih rendah. (2) Pencatatan keuangan yang dilakukan beberapa UMKM di kecamatan indragiri hanya sebatas laporan bisnis yang dibuat sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masing-masing kecamatan.. (2b) UMKM Kecamatan Tembilian pada sektor perdagangan emas, obat-obatan, elektronik dan handphone baik besar maupun kecil aset dan omset, mereka telah melaksanakan penyusunan laporan keuangan yang baik sesuai dengan yang berlaku standar akuntansi, dimana mereka menyadari bahwa laporan keuangan sangat penting untuk bisnis mereka. Dengan baik laporan keuangan, mereka dapat memberikan informasi yang akurat kepada pihak yang berkepentingan seperti mengajukan kredit bank, tersebut. (3) Kendala-kendala UMKM Kecamatan Tembilian pada sektor perdagangan emas, obat-obatan, elektronik, dan handphone dalam menerapkan SAK-ETAP, sebagai berikut : tingkat pendidikan yang rendah, pengetahuan yang kurang dan keahlian yang berkaitan dengan akuntansi, kurangnya tenaga ahli yang dapat melakukan proses pembukuan sesuai standar, persepsi yang menganggap bahwa kegiatan pembukuan tidak penting bagi perusahaan, kompleksitas dalam akuntansi proses yang menyebabkan mereka masih belum memisahkan dana pribadi dan dana yang digunakan untuk bisnis (Baas dan Schrooten 2006).

Menurut Grace (2010) dalam skripsinya berjudul “ Adoption of IFRS for SMEs in Financial Reporting among Small and Medium Scale Enterprises in Tourism Industry. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah UKM telah menerapkan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) untuk Pengusaha Kecil dan Menengah (UKM) sambil menyiapkan laporan keuangan dan jika ada praktik keuangan yang buruk berkontribusi pada kegagalan UKM dan memberikan wawasan tentang strategi yang akan diadopsi jika kegagalan harus dihindari. Praktik akuntansi telah berkembang secara bertahap selama beberapa tahun. Banyaknya prosedur dioperasikan secara otomatis oleh orang yang tidak pernah mempertanyakan apakah ada metode alternatif yang sama validnya (ACCA, Teks Studi, 2002). UKM tidak diwajibkan oleh hukum untuk menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan IFRS. Ini mengarah ke ketidakkonsistenan cara UKM menyusun laporan keuangan mereka perbandingan antar perusahaan dan perbandingan kinerja UKM selama periode yang rumit. Dalam beberapa kasus, UKM yang berusaha untuk menyesuaikan dengan GAAP (IFRS) menghadapi berbagai tantangan karena peningkatan ruang lingkup dan kompleksitas masalah yang dibahas karena panduan implementasi yang mustahil. Yang lain tidak menyiapkan laporan keuangan sama sekali. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian menyimpulkan sebagai berikut bahwa tidak ada penerapan IFRS untuk UKM dan ada beberapa penjelasan tentang negara bagian ini. Juga dicatat bahwa; banyak UKM tidak dapat membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut penggunaan IFRS.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Siklus Akuntansi**

Sebagai sebuah metode akuntansi mempunyai tahapan-tahapan yang harus dijalani untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Secara umum, laporan keuangan yang akan didapatkan di akhir proses akuntansi adalah hasil dari semua proses pencatatan yang dilakukan mulai dari pencatatan transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan yang terjadi terus menerus dan berulang-ulang. Proses inilah yang disebut dengan siklus

akuntansi. Siklus akuntansi merupakan proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum prinsip-prinsip dan kaidah akuntansi, prosedur-prosedur, metode-metode,serta teknik-teknik dari segala sesuatu yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi dalam suatu periode tertentu.

Kieso (2013:7:171) menyatakan bahwa siklus akuntansi adalah prosedur akuntansi yang biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mencatat transaksi dan membuat laporan keuangan. Tahapan-tahapan siklus akuntansi akuntansi tersebut, antara lain:

1. Mengidentifikasi dan mencatat transaksi yang terjadi
2. Melakukan penjurnalan.
3. Melakukan penggolongan dengan memposting ke buku besar.
4. Menyusun neraca saldo yang belum disesuaikan.
5. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat ayat-ayat jurnal penyesuaian.
6. Menyusun neraca saldo yang telah disesuaikan.
7. Menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Arus Kas.
8. Jurnal penutupan.
9. Neraca saldo pasca-penutupan.
10. Ayat jurnal pembalik.

## **2.2.2 Laporan Keuangan**

### **a. Pengertian Laporan Keuangan**

Menurut Martani (2012) laporan keuangan merupakan informasi bagi penggunaannya ,terutama pemilik perusahaan investor, kreditor, dan juga manajemen untuk mengambil keputusan-keputusan terkait perusahaan di masa mendatang seperti

- a) Kelayakan untuk menambah investasi kedalam perusahaan atau sebaliknya penentuan apakah harus melakukan penarikan investasi.

b) Kelayakan untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan.

Menurut Kieso (2011) Laporan keuangan merupakan sarana utama melalui mana informasi keuangan dikomunikasikan kepada pihak di luar perusahaan. Laporan keuangan yang sering disajikan adalah neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas serta laporan ekuitas pemilik atau pemegang saham.

Kewajiban bagi perusahaan untuk membuat dan melaporkan keuangan perusahaannya pada suatu periode tertentu. Hal yang dilaporkan kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui kondisi dan posisi perusahaan terkini. Dalam pengertian yang sederhana menurut Kasmir (2012) , laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan adalah suatu laporan tertulis yang menyajikan dan memberi informasi tentang kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

Laporan keuangan juga bisa diartikan sebagai catatan keuangan perusahaan yang telah disusun rapi mengevaluasi kinerja perusahaannya, dimana informasi tersebut untuk memenuhi pihak-pihak yang memakainya. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan laporan keuangan adalah susunan laporan yang menampilkan posisi keuangan serta kinerja keuangan dalam sebuah entitas/perusahaan. Sedangkan Fahmi (2012:21) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Dari beberapa pengertian tersebut, laporan keuangan dapat diartikan sebagai informasi yang diperoleh dari proses akuntansi yang memiliki peran besar dalam mempengaruhi keputusan-keputusan mengenai perusahaan. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis (Hery,2016 :15).

## **b. Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan dari laporan keuangan IAI adalah untuk memberikan informasi detail tentang posisi keuangan (financial position), kinerja keuangan (financial performance) dan arus kas (cash flow). Sedangkan Kasmir (2012:10) menyatakan secara umum laporan keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak sesuai dengan kebutuhan perusahaan maupun secara berkala.

Adapun tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut (Kasmir, 2015:10)

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan dalam perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas, maka dapat ditarik

Kesimpulan bahwa suatu laporan keuangan berfungsi untuk:

- a. Mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan pada kurun waktu tertentu melalui laporan historis yang secara sistematis memberikan informasi menyeluruh mengenai aktiva, hutang serta modal yang

dikenal dengan nama Neraca (Balance Sheet).

- b. Mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan pada kurun tertentu melalui laporan historis yang secara sistematis memberikan informasi menyeluruh mengenai penghasilan, biaya serta laba atau rugi yang di peroleh yang dikenal dengan nama Laporan Laba Rugi (Income Statement).
- c. Mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan pada kurun waktu tertentu melalui laporan historis yang secara sistematis, memberikan informasi menyeluruh mengenai aktivitas investasi, pendapatan dan operasi selama periode pelaporan, yang dikenal dengan nama Laporan Perubahan Ekuitas (Statement of Owner's Equity).
- d. Setiap laporan tersebut menyediakan informasi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya namun saling berkaitan karena mencerminkan aspek yang berbeda dari transaksi-transaksi atau peristiwa lain yang sama.

Kegiatan akuntansi pada dasarnya merupakan kegiatan mencatat, menganalisis, menyajikan dan menafsirkan data keuangan dari lembaga perusahaan dan lembaga lainnya dimana aktivitasnya berhubungan dengan produksi dan pertukaran barang atau jasa. Akuntansi mampu memberikan informasi tentang keuangan dan hasil operasi perusahaan seperti tercermin pada laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Oleh sebab itu, laporan keuangan dapat dipakai sebagai alat untuk berkomunikasi antara sebagai alat untuk berkomunikasi antara berbagai pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan.

Laporan keuangan dapat menjadi bahan sarana informasi bagi seseorang untuk menganalisa kondisi keuangan suatu perusahaan sehingga akan dinilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan adalah berupa data yang menggambarkan perkembangan posisi keuangan dan aktivitas perusahaan secara periodik, sehingga dapat dikatakan bahwa laporan keuangan

merupakan hasil akhir dari proses anggaran kas yang disusun secara sistematis sehingga menggambarkan hasil operasional perusahaan pada periode akuntansi yang bersangkutan.

### **2.2.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas SAK ETAP**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan interpretasi standar akuntansi keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAI IAI) dan Dewan Standar Syariah (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya. UKM yang bukan perusahaan yang terdaftar di pasar modal.

Menjawab kebutuhan ini pada tahun 2009, Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menyusun standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas public (SAK ETAP) yang diperuntukkan bagi entitas tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas public signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditor, dan lembaga pemeringkat kredit.

SAK ETAP disahkan oleh 18 orang anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Mei 2009 di Jakarta. SAK ETAP terdiri atas 30 Bab dan dilengkapi dengan daftar istilah dibagian akhir. SAK ETAP diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2011 dan telah disosialisasikan kepada masyarakat. SAK ETAP disusun dan diterbitkan oleh IAI dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi UKM dalam menyusun laporan keuangan. Sejak diterbitkannya, SAK ETAP telah menjadi pilar kedua standar akuntansi keuangan Indonesia.

SAK ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP, bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun.

Sesuai dengan namanya, maka sasaran penggunaan dari standar ini adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik (misalnya UKM, private entitas dan lainnya) mengalami dilema dalam penyusunan laporan keuangan. Mereka menginginkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar untuk tujuan-tujuan antara lain memperoleh keuangan yang sesuai dengan standar untuk tujuan pelaporan pajak maupun tujuan internal perusahaan. Namun ada hambatan mengaplikasikan SAK umum sehingga menimbulkan biaya yang besar apabila diterapkan.

IAI melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih memahami pentingnya penyusunan laporan keuangan dan melakukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP akan menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan akurat, karena penyusunan laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut SAK ETAP yaitu: relevan, mudah dipahami, keandalan, kelengkapan, substansi mengguli bentuk, pertimbangan sehat, materialitas, tepat waktu, dan keseimbangan antara biaya dan manfaat. Dengan adanya SAK ETAP, pelaku usaha kecil dan menengah diharapkan mampu untuk menyusun laporan keuangannya sendiri, dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga akses untuk mendapatkan pendanaan akan semakin luas.

## **2.3 SAK ETAP**

### **2.3.1 Sejarah singkat SAK ETAP**

Ikatan Akuntansi Indonesia sejak juli 2009 telah meluncurkan standar akuntansi ETAP (SAK-ETAP). Namun standar ini unik karena exposure draftnya diberi nama Standar Akuntansi UKM (Usaha Kecil Menengah), namun mengingat definisi UKM sendiri sering berubah, maka untuk menghindari kerancuan, standar ini diberi nama SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Wahyuni, 2012).

Sesuai dengan namanya maka sasaran pengguna dari standar ini adalah entitas yang tidak memiliki tanggung jawab akuntabilitas kepada publik (ETAP). SAK ETAP beranalogi dengan IFRS SMes (Small and IFRS SMEs namun dengan beberapa penyesuaian.

Adanya SAK ETAP, maka perusahaan kecil seperti UMKM tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan SAK Umum yang berlaku. Di Dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan SAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks.

Selama ini perubahan yang tidak memiliki akuntabilitas publik mengalami dilema dalam penyusunan laporan keuangan. Mereka menginginkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar untuk tujuan-tujuan antara lain memperoleh kredit dari bank, tujuan pelaporan pajak maupun tujuan internal perusahaan. Namun, hambatan dalam pengaplikasian SAK Umum terkait kompleksitas SAK Umum sehingga menimbulkan biaya yang besar apabila diterapkan.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) memahami yang merupakan implikasi dari SAK Umum. Secara substansi tidak terdapat perbedaan signifikan antara keduanya, namun persyaratan disclosure dari SAK ETAP berkurang signifikan dari SAK Umum (Eka,2012).

Entitas yang laporan keuangan mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP. Apabila perusahaan memakai SAK-ETAP, maka auditor yang akan melakukan audit di perusahaan tersebut juga akan mengacu kepada SAK ETAP.

Selanjutnya ketentuan transisi juga menjelaskan bahwa entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP kemudian tidak memenuhi persyaratan entitas yang boleh menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut tidak diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.

Hal ini misalnya ada perusahaan menengah yang memutuskan menggunakan SAK-ETAP pada tahun 2011, namun kemudian mendaftar menjadi perusahaan publik pada tahun berikutnya. Entitas tersebut wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK non ETAP dan tidak diperkenankan untuk menerapkan SAK ETAP ini kembali. Sebaliknya entitas yang sebelumnya menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut dapat menggunakan SAK ETAP ini dalam menyusun laporan keuangan (Wahyudi, 2011).

### **2.3.2 Persiapan Penetapan SAK ETAP**

Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) akan dinyatakan efektif berlaku untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, yaitu entitas yang memiliki 2 kriteria yaitu tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan, dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal dalam kriteria kedua ini adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit (Auliyah, 2012).

### 2.3.3 Ruang Lingkup SAK ETAP

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) akan dinyatakan efektif berlaku untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, yaitu entitas memiliki dua kriteria, antara lain:

- 1) Tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan
- 2) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Pada umumnya, entitas tanpa akuntabilitas publik adalah usaha kecil dan menengah (UKM), oleh karena itu pengguna SAK ETAP akan banyak terdiri dari entitas dengan kategori UKM. Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

- a) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal, atau
- b) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk kelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksadana dan bank investasi.
- c) Entitas yang memiliki akuntabilitas public signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

### 2.3.4 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP

SAK ETAP paragraf 24 menyatakan bahwa pengukuran umur laporan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mengetahui Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas, dan

- b. Mengetahui bagaimana struktur permodalan Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal

Lebih lanjut lagi SAK ETAP menjelaskan pada paragraf 2.34-2.37 mengenai pengakuan unsur laporan keuangan yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Aset

Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan.

- 2) Kewajiban

Kewajiban diakui dalam neraca jika memungkinkan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

- 3) Penghasilan

Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

- 4) Beban

Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

### 2.3.5 Pengukuran Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP

Pengukuran adalah proses pendapatan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu. Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009).

1. Biaya historis, Aset adalah jumlah kas atau setara kas dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009). Prinsip Biaya historis yaitu merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diserahkan atau memperoleh aset pada saat perolehan atau konstruksi atau jika dapat diterapkan jumlah yang dapat didistribusikan langsung ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu (Lestari, 2013).
2. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dalam penjualan aset atau pembayaran mentransfer kewajiban dalam transaksi yang tertentu antara partisipan di pasar dan tanggal pengukuran fair value dengan asumsi bahwa entitas merupakan unit yang akan beroperasi selamanya tanpa ada intensi atau keinginan untuk melikuidasi, untuk membatasi secara material skala operasionalnya atau transaksi dengan persyaratan yang merugikan. (Sonbay, 2010).

### **2.3.6 Penyusunan Laporan Keuangan SAK ETAP**

SAK ETAP paragraf 3.2 menjelaskan bahwa laporan keuangan menyajikan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban. Penerapan SAK ETAP dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK ETAP tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas. Lebih lanjut lagi pada paragraf 3.9 SAK ETAP menyatakan bahwa informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas harus mengidentifikasi secara jelas setiap komponen laporan keuangan. Jika laporan keuangan termasuk komponen dari laporan lain, maka laporan keuangan harus dibedakan dari informasi lain dalam laporan tersebut.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam SAK ETAP (2009), laporan keuangan adalah bagian dari proses laporan keuangan, dan laporan keuangan yang lengkap meliputi :

#### **1. Laporan Neraca**

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan, yang menunjukkan aset, liabilitas dan ekuitas dari suatu entitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang disajikan sebagai klarifikasi yang terpisah, kecuali untuk industri tertentu dimungkinkan penyajian berdasarkan likuiditas jika hal tersebut memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Jika pengecualian tersebut ditetapkan, maka entitas

menyajikan seluruh aset dan liabilitas berdasarkan urutan likuiditas (Baperpan, 2012). Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu akhir periode pelaporan. Entitas menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu akhir periode pelaporan. Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas. SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan dalam neraca yaitu minimal mencakup pos-pos berikut (Ikatan Akuntansi, 2009).

- a) Kas dan setara kas
- b) Piutang usaha dan piutang lainnya
- c) Persediaan
- d) Properti dan Investasi
- e) Aset tetap
- f) Aset tidak berwujud
- g) Utang usaha dan utang lainnya
- h) Aset dan kewajiban pajak
- i) Kewajiban
- j) Ekuitas.

## **2. Laporan Laba Rugi**

Laporan laba-rugi menurut Syaiful Bahri (2016:136) merupakan suatu laporan yang disusun secara sistematis berdasarkan standar akuntansi yang memuat tentang hasil operasi selama satu tahun atau periode akuntansi. Laporan ini menunjukkan sumber darimana penghasilan diperoleh akuntansi serta beban perusahaan, secara sistematis merupakan laporan tentang penghasilan, beban-beban, dan laba atau rugi.

Laporan laba rugi akan menggambarkan sumber-sumber penghasilan yang diperoleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan perusahaan dengan memperhatikan selisih antara pendapatan dan

beban akan dapat ditetapkan berapa jumlah laba atau rugi yang didapat perusahaan dalam suatu periode tertentu. Jika pendapatan lebih besar daripada beban pada periode tertentu, berarti perusahaan memperoleh laba. Jika pendapatan lebih kecil dari pada beban pada periode tertentu berarti perusahaan memperoleh kerugian.

Laporan laba-rugi dalam SAK-ETAP mencakup pos-pos berikut ini.

- a) Pendapatan
- b) Beban keuangan
- c) Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas
- d) Beban pajak
- e) Laba rugi atau netto

Menurut SAK ETAP jika entitas hanya mengalami perubahan ekuitas yang muncul dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi selama periode laporan keuangan disajikan maka entitas dapat menyajikan laporan laba-rugi dan saldo laba sebagai pengganti laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas.

Laporan laba rugi dan saldo laba menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan. Lebih lanjut lagi, SAK ETAP paragraf 6.5 menyatakan entitas menyajikan laporan laba-rugi dan saldo pos-pos berikut sebagai tambahan atas informasi yang disyaratkan dalam laporan laba-rugi:

- a) Saldo laba pada awal periode pelaporan
- b) Dividen yang diumumkan dan dibayarkan atas terutang selama periode.
- c) Penyajian kembali saldo laba setelah koreksi kesalahan periode lalu
- d) Penyajian kembali saldo laba setelah perubahan kebijakan akuntansi
- e) Saldo laba pada akhir periode pelaporan.

### 3. Laporan Perubahan Ekuitas

Kasmir (2012:29) menyatakan bahwa laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Sedangkan Hery (2016:16) menyatakan laporan perubahan dalam ekuitas pemilik suatu perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Ekuitas pemilik akan bertambah dengan adanya investasi (setoran modal) dan laba bersih. Sebaliknya, ekuitas pemilik akan berkurang dengan adanya prive (penarikan/pengambilan untuk kepentingan pribadi) dan rugi bersih.

Laporan perubahan ekuitas menurut SAK ETAP menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan, dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi, dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (bergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut.

Informasi yang disajikan laporan perubahan ekuitas menurut SAK ETAP:

- a) Laba atau rugi untuk periode.
- b) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dan ekuitas.
- c) Pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diskusi.
- d) Rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode.

### 4. Laporan Arus Kas

Arus kas (cash flow) adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi dari kegiatan transaksi pembiayaan/pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode. Rudianto (2012:194) menyatakan bahwa laporan arus kas adalah alat pembayaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan untuk investasi maupun menjalankan operasi perusahaan setiap saat dibutuhkan.

Sedangkan Hery (2016:17) menyatakan bahwa laporan arus kas adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas, yaitu mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai pada aktivitas pendanaan untuk suatu periode waktu tertentu.

SAK ETAP paragraf 7.3 menyatakan entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas operasi, dan aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi contohnya antara lain:

- a) Penerimaan kas dari royalti, fee, komisi, dan pendapatan lain.
- b) Penerimaan kas dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain.
- c) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa.
- d) Pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan.
- e) Pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan, kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi.

Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali.

- 1) Arus kas dari aktivitas investasi contohnya antara lain :
  - a) Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap (termasuk aset tetap yang dibangun sendiri) aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya.
  - b) Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya.
  - c) Pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas lain dan bunga dari joint venture (selain penerimaan dari efek yang diklasifikasikan sebagai kas atau setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan).
  - d) Penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari

entitas lain dan bunga dari joint venture (selain penerimaan dari efek yang diklasifikasikan sebagai kas atau setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan).

- e) Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.
  - f) Penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.
- 2) Arus kas dari aktivitas pendanaan contohnya, antara lain:
- a) Penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain.
  - b) Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham entitas.
  - c) Penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya.
  - d) Pelunasan pinjaman.
  - e) Pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.

## **5. Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan, penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Catatan tersebut menurut SAK ETAP paragraf 8.2 harus mengungkapkan .

- 1) `Dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang signifikan
- 2) Informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangannya.

Syaiful Bahri (2016:155) menyatakan bahwa catatan atas laporan keuangan adalah informasi tentang pos-pos dalam neraca, laporan laba-rugi, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan harus disusun oleh perusahaan bersamaan dengan laporan keuangan yang lain, serta disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

Dalam SAK ETAP bahwa secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan SAK ETAP.
- 2) Ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan.
- 3) Informasi yang mendukung pos-pos dalam laporan keuangan sesuai urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tertentu.
- 4) Pengungkapan lain berisi tentang informasi yang tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Informasi-informasi tersebut adalah domisili dan bentuk perusahaan, negara, alamat pendirian perusahaan, namun perusahaan dalam grup, nama anggota direksi dan komisaris, jumlah karyawan pada akhir periode, serta nilai kurs yang digunakan pada tanggal neraca dan jaminan kredit.

## **2.4 Pengertian Usaha Kecil dan Menengah**

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan sebuah istilah yang mengacu pada usaha berskala kecil yang memiliki kekayaan bersih maksimal sekitar Rp.200.000.000, belum termasuk tanah dan bangunan. UKM merupakan salah satu contoh dari badan usaha perseorangan dimana didirikan dan dimiliki oleh satu orang saja. Menurut Keputusan Presiden RI No.99 Tahun 1998, UKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dimana tipe bidang usahanya bersifat heterogen serta perlu dilindungi oleh pemerintah untuk mencegah persaingan yang tidak sehat.

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. UKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur. Selain itu, UKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. UKM juga memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang berpotensi di suatu daerah yang belum diolah secara komersial. UKM dapat membantu mengolah sumber daya alam yang ada di setiap daerah maupun pendapatan negara Indonesia.

#### **2.4.1 Pengertian Usaha Kecil**

Menurut Departemen Keuangan, Usaha Kecil adalah usaha produksi milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia yang memiliki aset penjualan paling banyak Rp. 1 Miliar/tahun. Sedangkan Menurut Negara Koperasi dan UKM, usaha kecil adalah milik Warga Negara Indonesia baik perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih sebanyak-banyaknya Rp. 200.000.000 dan mempunyai omzet atau nilai output penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000 dan usaha tersebut berdiri sendiri.

Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri serta dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000.

### 2.4.2 Pengertian Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Sampai dengan paling banyak sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Kriteria usaha menengah berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil Mikro dan Menengah adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau,
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Adapun ciri-ciri menengah antara lain:

- 1) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.
- 2) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
- 3) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek dan pemeliharaan kesehatan.
- 4) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin, tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dan lain-lain.
- 5) Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.
- 6) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih.

### 2.4.3 Peran, Fungsi, dan Tujuan Usaha Kecil dan Menengah

UKM di Indonesia mempunyai peranan yang penting sebagai penopang perekonomian. Penggerak utama perekonomian di Indonesia selama ini pada dasarnya adalah sektor UKM. Berkaitan dengan hal ini, paling tidak terdapat beberapa fungsi utama UKM dalam menggerakkan ekonomi Indonesia, yaitu:

- 1) UKM sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang yang tidak tertampung di sektor formal.
- 2) UKM mempunyai kontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).
- 3) UKM sebagai sumber penghasil devisa negara melalui ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan sektor ini.

Melihat peranannya yang begitu besar maka pembinaan dan pengembangan industri kecil bukan saja penting sebagai jalur ke arah pemerataan hasil-hasil pembangunan, tetapi juga sebagai unsur pokok dari seluruh struktur industri di Indonesia, karena dengan investasi yang kecil dapat berproduksi secara efektif dan dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Fungsi dan peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sangat besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Fungsi dan peran tersebut meliputi:

- 1) Penyediaan barang dan jasa
- 2) Penyerapan tenaga kerja
- 3) Pemerataan pendapatan
- 4) Sebagai nilai tambah bagi produk daerah.
- 5) Peningkatan taraf hidup masyarakat.

Adapun tujuan dari Usaha Kecil dan Menengah yaitu:

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang berkembang dan berkeadilan.
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UKM menjadi

usaha yang tangguh dan mandiri

- 3) Meningkatkan peran UKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja.

#### **2.4.4 Kelebihan dan Kelemahan Usaha Kecil dan Menengah**

Dengan ukurannya yang kecil dan tentunya fleksibilitas yang tinggi, usaha kecil menengah memiliki berbagai kelebihan, terutama dalam segi pembentukan dan operasional. UKM memiliki kontribusi besar bagi bergulirnya roda ekonomi suatu negeri, bukan hanya karena ia adalah benih yang memungkinkan tumbuhnya bisnis besar, melainkan juga karena ia menyediakan layanan tertentu bagi masyarakat yang bagi bisnis besar dinilai kurang efisien secara biaya. Berikut adalah beberapa kelebihan UKM:

##### **1) Fleksibilitas Operasional**

Usaha kecil menengah biasanya dikelola oleh tim kecil yang masing-masing anggotanya memiliki wewenang untuk menentukan keputusan. Hal ini membuat UKM lebih fleksibel dalam operasional kesehariannya. Kecepatan reaksi bisnis ini terhadap segala perubahan (misalnya: pergeseran selera konsumen, trend produk dll) cukup tinggi, sehingga bisnis skala kecil ini lebih kompetitif.

##### **2) Kecepatan Inovasi**

Dengan adanya tidak adanya hirarki perorganisasian dan kontrol dalam UKM, produk-produk dan ide-ide baru dapat dirancang, digarap, dan diluncurkan dengan segera. Meski ide-ide cemerlang itu berasal dari pemikiran karyawan-karyawan bukan pemilik kedekatan diantara mereka membuat gagasan tersebut cenderung lebih mudah didengar, diterima, dan dieksekusi.

### 3) Struktur Biaya Rendah

Kebanyakan usaha kecil dan menengah tidak punya ruang kerja khusus di kompleks-kompleks perkantoran. Sebagian dijalankan dirumah dengan anggota keluarga sendiri sebagai pekerjaannya. Hal ini mengurangi biaya ekstra (overhead) dalam operasinya. Lebih jauh lagi, usaha menengah kecil juga menerima sokongan dari pemerintah, organisasi non-pemerintah dan bank dalam bentuk kemudahan pajak, donasi, maupun hibah. Faktor ini berpengaruh besar bagi pembiayaan.

### 4) Kemampuan Fokus di Sektor yang Spesifik

UKM tidak wajib untuk memperoleh kuantitas penjualan dalam jumlah besar untuk mencapai titik balik (break even point – BEP) modal mereka. Faktor ini memungkinkan usaha kecil menengah untuk fokus di sektor produk atau pasar yang spesifik. Contohnya: bisnis kerajinan rumahan bisa fokus menggarap satu jenis dan model kerajinan tertentu dan cukup melayani permintaan konsumen tertentu untuk bisa mencapai laba.

Sedangkan kelemahan-kelemahan dari Usaha Kecil dan Menengah antara lain:

- 1) Sempitnya waktu untuk melengkapi kebutuhan sebab sedikitnya jumlah pengambil keputusan dalam usaha kecil menengah, mereka kerap terpaksa harus pontang-panting berusaha memenuhi kebutuhan pokok bisnisnya, yakni: produksi, sales, dan marketing. Hal ini bisa mengakibatkan tekanan jadwal yang berat, membuat mereka tidak bisa fokus menyelesaikan permasalahan satu persatu. Tekanan semacam ini bisa muncul tiba-tiba ketika bisnis mereka memperoleh order dalam jumlah yang besar, atau beberapa order yang masuk masuk dalam waktu hampir bersamaan. Lebih dahsyat lagi jika suatu ketika ada lembaga bisnis besar yang merasa terancam dan mulai melancarkan serangan yang tidak fair demi

menyingkirkan pesaing potensialnya.

2) Kontrol Ketat atas Anggaran dan Pembiayaan

Usaha skala kecil umumnya memiliki anggaran yang kecil. Akibatnya, ia kerap sekali dipaksakan membagi-bagi dana untuk membiayai berbagai kebutuhan seefisien mungkin. Ketidakmampuan untuk mengumpulkan modal yang lebih besar juga memaksa usaha kecil menengah menjalankan kebijakan penghematan yang ketat, terutama untuk mencegah kekurangan pembiayaan operasional sekecil apapun. Kekurangan pembiayaan operasional yang tidak dicegah bisa mengakibatkan kebangkrutan, sebab kapasitas UKM untuk membayar hutang biasanya hampir tidak ada.

3) Kurangnya Tenaga Ahli

Usaha kecil menengah biasanya tidak mampu membayar jasa tenaga ahli untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Hal ini merupakan kelemahan usaha kecil menengah sangat serius. Apalagi jika dibandingkan dengan lembaga bisnis besar yang mampu mempekerjakan banyak tenaga ahli. Kualitas produk barang atau jasa yang bisa dihasilkan tanpa tenaga ahli sangat mungkin berada dibawah standar kecil ini di pasar yang luas bisa sangat kecil.

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas, berikut adalah kerangka konseptual dalam penelitian ini:

Sistem pembukuan UKM selama ini sangat sederhana dan cenderung mengabaikan kaidah administrasi keuangan yang standar. Pelaksanaan pembukuan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan hal yang masih sulit bagi UKM. Keterbatasan pengetahuan pembukuan bukanlah hal yang penting bagi UKM (Rudianto, 2011). Hal tersebut juga terjadi pada PT. Abadi Mandiri International yang selama ini hanya menggunakan pencatatan barang masuk dan keluar sebagai laporan keuangan mereka. Padahal laporan keuangan yang akurat dan baku akan banyak membantu mereka dalam upaya pengembangan PT. Abadi Mandiri International. Dengan menyusun laporan keuangan dan memahami isi dari laporan keuangan, diharapkan akan dapat membantu pemilik PT. Abadi Mandiri International dalam mengembangkan usaha, baik keputusan investasi maupun keputusan untuk mengajukan kredit usaha. Setelah laporan keuangan selesai disusun, laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk mengukur, menilai, dan mengevaluasi kondisi dan potensi yang dimiliki PT. Abadi Mandiri International.

Ikatan Akuntan Indonesia sudah menyiapkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan untuk UKM) yang dinakan dengan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) yang resmi diberlakukan efektif 1 Januari 2011. Dengan disahkan SAK ETAP ini

diharapkan dapat membantu para pelaku UKM untuk membuat laporan keuangan yang andal secara lebih mudah. Laporan keuangan yang lengkap berdasarkan SAK ETAP terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). Penelitian ini bertujuan untuk menyusun laporan keuangan PT. Abadi Mandiri International yang sesuai dengan SAK ETAP agar laporan keuangan yang dibuat perusahaan bias lebih bersifat andal dan bermanfaat bagi PT. Abadi Mandiri International.

**Gambar 2.1**

**Kerangka Konseptual Penelitian**

